

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian tentang “Fungsi Negara Dikaitkan Dengan Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet”.

5.1.1 Pengaturan Tentang Eksistensi Netflix di Indonesia

Selama Netflix menjalankan usahanya di Indonesia sampai saat ini yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah :

1. Status badan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Netflix seharusnya mendirikan PT PMA;
2. Tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Tidak membayar pajak PPh dan PPN sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia;
4. Film-film yang berada pada koleksi Netflix tidak melalui proses penyensoran dan belum mendapatkan surat tanda lulus dari LSF sebagaimana semestinya.

Walau Netflix tidak mengikuti peraturan-peraturan tersebut, Netflix masih dapat diakses dan menjalankan usahanya di Indonesia sampai saat ini. Film-film yang tersedia di Netflix tidak ada satupun yang melalui proses penyensoran oleh LSF dan dapat dipastikan tidak memiliki surat tanda lulus sensor dari LSF. Secara badan hukumnya pun, Netflix tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Dengan tidak memiliki badan hukum di Indonesia, dapat juga dipastikan bahwa Netflix tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga tidak membayar pajak badan usaha.

5.1.2 Fungsi Negara Sebagai Pengawas Dikaitkan Terhadap Upaya Penyensoran Layanan Film Berlangganan dan Keberadaan Netflix

Indonesia sebagai negara memiliki fungsi sebagai pengawas. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah membentuk LSF yang bertugas untuk melakukan penelitian dan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Namun kenyataannya untuk layanan film berlangganan melalui media internet, LSF tidak melakukan fungsinya sebagai penyensor dan pengawas perfilman yang beredar di Indonesia. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena peraturan yang dimiliki sekarang tidak mewajibkan LSF untuk menyensor film yang ada di internet. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekosongan hukum pada penyensoran film bagi layanan film berlangganan melalui media internet. Selain itu Indonesia juga tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang film yang ada pada layanan film berlangganan melalui media internet.

5.2 Saran

Saran penulis untuk Negara untuk tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas seperti salah satunya adalah memblokir situs Netflix jika Netflix termasuk dalam kategori situs internet bermuatan negatif dan dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Selain itu Negara juga seharusnya mengoptimalkan fungsinya sebagai pengawas dengan membuat peraturan yang mengatur dan/atau lembaga yang mengawasi kegiatan usaha layanan film berlangganan melalui media internet ini. Peraturan yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, dan jenis peraturan lainnya yang dapat secara khusus mengatur tentang layanan film berlangganan melalui media internet secara lebih rinci, khusus, dan lengkap. Karena sampai saat ini belum ada peraturan atau lembaga yang secara khusus mengatur terutama tentang peraturan penyensoran secara khusus pada layanan film berlangganan melalui media internet seperti Netflix.

Saran penulis untuk Netflix adalah Netflix harus terlebih dahulu mentaati peraturan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia. Seperti mendirikan PT, melakukan permohonan PMA, melakukan permohonan dan mendapatkan izin untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi, membayar PPh dan PPN sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, dan mengikuti peraturan tentang penyensoran di Indonesia yang berlaku untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Akhlis Suryapati, *Hari Film Nasional Tinjauan dan Restrospeksi*, (Jakarta: Panitia hari Film Nasional ke-60 Direktorat perfilman tahun 2010, 2010) hal.26.

Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatam Media, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (2001),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta 1986.

Max Boli Sabon, *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 96

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, 2013

Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta:UGM Press). 2002 Cet. Ke-8.

La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung, CV Utomo, 2005.

Jimly Ashidique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, 2006.

Y. Sri Pujiastuti, *IPS Terpadu*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 31

Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Peraturan lainnya :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Artikel/Jurnal :

Ambar Wicaksono, Perjalanan Lembaga Sensor Film Indonesia, Universitas Sebelas Maret, 2012

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Situs Internet:

<http://kbbi.web.id/fungsi>

<http://kbbi.web.id/negara>

<https://help.netflix.com/legal/termsfuse?locale=en&docType=termsfuse>

<http://www.klikmania.net/cara-daftar-netflix/>

<http://www.keypoo.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-layanan-netflix-yang-harus-diketahui/>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160113_indonesia_sensor_netflix_lsf

[http://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/20040007/Netflix.Diblokir.Telkom.Menko minfo.Beberkan.Regulasi?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kait rd](http://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/20040007/Netflix.Diblokir.Telkom.Menko%20minfo.Beberkan.Regulasi?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kait%20rd)
<http://inet.detik.com/read/2016/01/27/153620/3128563/317/dirut-telkom-beberkan-alasan-utama-blokir-netflix>

<http://www.trentekno.com/25452/25452/>

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160113_indonesia_sensor_netflix_lsf

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160113135214-185-104006/belum-berizin-haruskah-netflix-dihentikan-di-indonesia/>

<http://tuoitrenews.vn/business/32662/netflix-must-seek-permission-to-launch-in-vietnam-ministry>

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160127171752-213-107142/telkom-vietnam-juga-blokir-netflix/>

<http://www.lsf.go.id/publik/content/581242f096cab>

<http://mediaindonesia.com/news/read/69800/lembaga-sensor-film-sekarang-mengerikan/2016-10-01>

<https://help.netflix.com/legal/termsofuse?locale=en&docType=termsofuse>

<http://www.fundinguniverse.com/company-histories/netflix-inc-history/>

<http://www.indotelko.com/kanal?c=bid&it=ekspansi-netflix-belum-berbuah-manis>

<http://www.bintang.com/celeb/read/2423623/indonesia-tak-menjadi-satu-satunya-yang-sulit-ditembus-netflix>

<https://tirto.id/netflix-di-indonesia-dijegal-sebelum-berkembang-Dd>

<https://arenalte.com/berita/regulasi/telkom-grup-blokir-netflix-ada-apa/>

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160129183506-213-107660/mnc-group-ikut-blokir-sementara-netflix/>

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160108114443-185-102985/katalog-film-netflix-indonesia-tak-selengkap-di-as/>

<https://www.finder.com/id/netflix-tv-shows>

<http://tekno.kompas.com/read/2016/01/08/10450047/Koleksi.Film.di.Netflix.Tiap.Negara.Ternyata.Berbeda>

<http://teknologi.metrotvnews.com/read/2016/01/08/209475/kominfo-netflix-belum-terdaftar>